

Wahyuddin Halim
Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar
(wahyuddin@hotmai.com)

Abstrak

Artikel ini berupaya mengulas pengertian beberapa konsep kunci berkaitan dengan otoritas politik dan agama dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, khususnya sejak abad ke-20, seperti arung (bangsawan), topanrita (cendekiawan) dan anregurutta (kiyai). Setelah menganalisis pergeseran makna dari konsep-konsep tersebut, artikel ini berupaya merunut relasi antara otoritas tradisional (arung) dengan sosok topanrita yang, dalam makna tradisionalnya, identik dengan konsep cendekiawan dalam masyarakat modern. Setelah menunjukkan peralihan makna dari konsep topanrita sehingga lebih merepresentasikan sosok ulama tradisional dalam masyarakat Bugis, artikel ini menyimpulkan, salah satu faktor pen pencapaian masa keemasan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar di masa lalu adalah karena adanya relasi yang bersifat kritis dan simbiotik antara otoritas politik (arung) dan sosial-agama (topanrita atau anregurutta) dalam kerajaan-kerajaan tersebut.

This article attempts to review some understanding of key concepts related to political and religious authority in the Bugis people of South Sulawesi, particularly since the 20th century, such as arung (nobility), topanrita (scholar) and anregurutta (Islamic scholar). After analyzing the shift in the meaning of these concepts, this article seeks to trace the relationship between traditional authorities (white) with topanrita figure that, in the traditional sense, synonymous with the concept of intellectuals in modern society. After pointing out the meaning of the concept of transition topanrita so much represents the traditional ulama in Bugis society, the article concluded, among other factors of golden era of kingdoms Bugis-Makassar in the past is because of the critical relationship between political authority and symbiotic (arung) and socio-religious (anregurutta or topanrita) in these kingdoms.

Kata kunci: Arung, topanrita, otoritas tradisional, ulama Bugis, gurutta, anregurutta.

A. Pendahuluan

Bagaimana idealnya seorang cendekiawan bersikap terhadap kekuasaan? Ada yang berpendapat, cendekiawan seharusnya tidak terlibat dalam kekuasaan. Yang lain melihat cendekiawan bisa berperan ganda; sebagai otoritas birokratik yang baik sambil tetap berperan sebagai intelektual yang teguh memelihara kejernihan idealisme dan bersikap kritis terhadap kenyataan sosial di luar lingkungan birokrasi. Namun demikian, karena cendekiawan (*intellectual*) pada dasarnya lebih merupakan kapasitas dan kualitas ketimbang status dan posisi, cendekiawan dan kekuasaan memang tidak perlu diposisikan secara dikotomis. Dengan menggunakan perspektif Antony D. Smith, yang melekatkan istilah *intellectual* untuk “*a type of personality and mental attitude*,”¹ dapat dikatakan bahwa kecendekiaan adalah kapasitas pribadi yang bisa dimiliki oleh siapa pun sekaligus sebagai akumulasi peran seseorang di bidang-bidang non-intelektual, termasuk birokrasi.

Dengan alur argumen seperti itu, seorang cendekiawan tak perlu serta-merta dianggap kehilangan kecendekiaan hanya karena dia memegang kekuasaan formal dalam masyarakat. Dengan mengelaborasi tiga tipe ideal yang pernah dirumuskan oleh Max Weber, Thomas Gibson mengidentifikasi kekuasaan yang disebut terakhir di atas sebagai otoritas birokratis negara modern.² Dua sumber kekuasaan lainnya adalah otoritas tradisional raja-raja yang berbasis warisan dan otoritas kharismatik para syaikh yang kosmopolit.³ Pada kenyataannya, dalam konteks Indonesia modern, banyak tokoh dalam pentas politik nasional yang bisa dijadikan contoh di mana peran sebagai cendekiawan dan negarawan atau birokrat terpadu secara harmonis dan sinergis. Beberapa figur yang bisa disebutkan antara lain Mohammad Hatta (1902-1980), Haji Agus Salim (1884-1954), Muhammad Natsir (1908-1993), A. Mukti Ali (1923-2004), Munawir Sjadzali (1925-2004), Emil Salim (l. 1930), B.J. Habibie (l. 1936), Abdurrahman Wahid (1940-2009), Quraish Shihab (l. 1944), dll. Tulisan ini berupaya menunjukkan beberapa contoh peran

¹ Anthony D. Smith, *The Ethnic Revival* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), h. 109.

² Thomas Gibson, *Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia: From the 16th to the 21st Century* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), h. 1-2.

³ *Ibid.*, h. 2.

cendekiawan dalam kekuasaan politik di Sulawesi Selatan pada sekitar abad ke-15 dan ke-16 sebagaimana terlihat dalam konsep “*topanrita*” dan bagaimana konsep kecendekiaan itu mengalami transformasi seiring dengan penetrasi Islam di kawasan ini, khususnya sejak Islamisasi Islam struktural pada awal abad ke-17.

B. Konsep Topanrita dalam masyarakat Bugis-Makassar

Secara etimologis, *topanrita* berarti orang yang menyaksikan. Kata *panrita* bisa berarti keahlian teknis, seperti tercermin dari ungkapan *panrita lopi* (ahli pembuat perahu), tapi dalam pengertian lain, *panrita* berarti ulama (sehingga dalam masyarakat seorang *panrita loppo* berarti ulama besar) atau pendeta.⁴ Pelras yakin bahwa kata *topanrita* diambil dari bahasa Sanskerta ‘*pandita*’ yang berarti ‘pendeta atau pertapa.’⁵ Dalam pengertian Pelras, *topanrita* adalah ‘orang yang menguasai seluk beluk agama, bijaksana, saleh dan jujur.’ Makna *topanrita* yang lebih luas diberikan oleh Mochtar Pabottingi, seorang cendekiawan asal Sulawesi Selatan. Menurutnya, *topanrita* adalah orang yang bersaksi, melihat dan menyimak atas suatu keadaan dan menyatakan keadaan sebenarnya. Di sini, *topanrita* bukan saja berperan sebagai pengamat yang objektif atas keadaan di sekitarnya, tapi juga memberi penilaian, kritik dan pertimbangan atas suatu keadaan. Dengan makna ini, tidak berlebihan jika *topanrita* diidentikkan dengan konsep cendekiawan (*intellectual*) dalam terminologi modern.

Lepas dari beragam pengertian di atas, *topanrita* juga merupakan salah satu dari empat kualitas ideal manusia Bugis, di luar kebangsawanan (*arung*), yang disebut dalam Lontara sebagai “*sulapa’ eppa*” (segi empat). Keempat kualitas atau sifat tersebut merupakan modalitas yang harus dimiliki setiap pemimpin yang baik. Selain *panrita* (saleh), tiga sifat yang dimaksud adalah *warani* (berani),

⁴ M. Ide Said DM., *Kamus Bahasa Bugis-Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1977), h. 148. Dalam kamus Bugis-Belanda karya B.F. Matthes, *Boegineesch-Hollandsch Woordenboek*, Amsterdam: ‘S Gravenhage, 1874) h. 118, *panrita* memiliki dua arti terpelajar, sarjana atau ilmuwan (*geleerd*) dan arsitek (*bouwmeester*).

⁵ Christian Pelras, *The Bugis*, diterjemahkan dengan judul *Manusia Bugis* oleh Abdul Rahman Abu, Hasriadi dan Nurhady Sirimorok (Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta Paris, EFEO, 2006), h. 259.

macca (cerdas) dan *sugi* (kaya).⁶ Menurut Mattulada, keempat sosok ideal ini, yang dia sebut sebagai ‘golongan fungsional’, termasuk lapisan elit kedua dalam pelapisan masyarakat Bugis-Makassar periode Lontara.⁷ Lapisan elit pertama adalah *Arung* yang terdiri atas *anakarung*, yaitu raja dengan lingkungan kerabat keluarga bangsawan yang menduduki jabatan-jabatan kepemimpinan politik pemerintahan secara turun-temurun, baik di pusat kerajaan maupun di daerah-daerah bawahannya. *Anakarung* menduduki status sosial tertinggi dalam masyarakat karena, secara genealogis, leluhur mereka dipercaya bersambung hingga ke sosok *tomanurung*. Konsep *tomanurung* (orang yang turun dari langit) ini diadopsi oleh kerajaan-kerajaan utama di Sulawesi Selatan, khususnya Luwu, Gowa, Bone dan Soppeng, untuk menjelaskan asal-usul kemunculannya seorang raja dan legitimasi tradisionalnya untuk menjadi pemimpin dalam masyarakatnya. Konsep ini sangat menentukan dalam proses pelapisan struktur sosial-politik dalam wilayah kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar khususnya, dan wilayah Austronesia pada umumnya.⁸ Dalam konsep *tomanurung*, kemunculan atau kehadiran seorang raja pertama digambarkan secara mitologis sebagai berasal dari langit dan merupakan manusia setengah dewa. Mitos ini memberikan kepadanya kewibawaan yang tinggi sehingga mendapatkan kepatuhan dan penghormatan dari rakyatnya.⁹

⁶ *Ibid.*, h. 255. Keempat kualitas moral (*sulapa eppa*) manusia Bugis tersebut sesungguhnya bisa dilihat personifikasinya pada empat tokoh penting Sulsel yang berbeda di masa berbeda namun, secara kebetulan, semuanya memiliki nama Jusuf (atau Yusuf). Yaitu, sifat *panrita* terdapat pada diri Syekh Yusuf al-Makassari di abad ke-17; *warani* termanifestasi dalam diri Jenderal M. Jusuf; *acca* direpresentasikan dengan baik oleh Prof. Dr. Ing. Baharuddin Jusuf Habibie; sementara sifat *sugi* ditampilkan oleh M. Jusuf Kalla. Yang disebut terakhir ini malah, dinilai Pelras (*Manusia Bugis*, h. 391), selain *to-sugi* juga pantas dipandang sebagai *to-acca* dan *to-panrita* sekaligus. Untuk ulasan selengkapnya keempat Jusuf ini, lihat Wahyuddin Halim “Yusuf and Empat Kualitas Utama Manusia Sulsel” dalam Abdillah Natsir, Andang B. Malla and M. Saleh Mude (eds.), *Yusuf Kalla: Membangun Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: Penerbit Blantika, 2004).

⁷ Mattulada, “Elite di Sulawesi Selatan” dalam *Antropologi*, no. 48 (1991), h. 92.

⁸ Untuk diskusi lebih jauh tentang peran mitos *tomanurung* dalam pembentukan elit politik dalam kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar, lihat Mattulada, *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Makassar: Hasanuddin University Press, 1998), khususnya Bab III, “To-Manurung” (h. 27-48)

⁹ Lihat Mattudala, “Manusia dan Kebudayaan Bugis-Makassar dan Kaili di Sulawesi” dalam *Antropologi*, No. 48, tahun XV.

Kualitas dan kapasitas utama *topanrita* bisa disimpulkan dari *paseng* (petuah) Ma'danrengngè ri Majauleng yang bernama La Tenritau: "*Aja' nasalaiko acca sibawa lempu*" (Milikilah kecerdasan dan kejujuran kapan saja). Yang dimaksud La Tenritau dengan *acca* adalah kemampuan mengerjakan semua pekerjaan dan menjawab semua pertanyaan serta kecakapan berkata-kata baik, logis dan lemah lembut sehingga menimbulkan kesan baik pada orang lain. Sementara *lempu'* adalah pola pikir dan prilaku yang selalu benar, tabiat baik dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Esa.

Dalam perspektif masyarakat Bugis-Makassar, integrasi kecerdasan dan kejujuran merupakan kualifikasi penting setiap calon pemimpin. Ketika ditanya oleh Arumpone (Raja Bone) tentang pangkal kecerdasan (*appongenna accaè*), Kajao Laliddong –seorang cendekiawan dan mahapatih raja Bone di abad ke-16-- menjawab: "*lempuè*" (kejujuran). Kajao Laliddong juga menyebut kejujuran raja (*komalempu'i Arung Mangkauè*) sebagai salah satu di antara tiga indikator keberhasilan panen(*tellu tanranna nasawè asè*). La Waniaga Arung Bila, cendekiawan Soppeng abad ke-16, berkata,"Kejujuran akan terus hidup, tapi kebenaran sulit dicari" (*Temmatè lempu'è mawatang sapparenna atongengngè*).

Di masa lalu masyarakat percaya, prilaku penguasa akan menentukan kondisi kehidupan mereka. Hal ini turut berperan mengekang para penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya demi terciptanya keadilan, keamanan dan kemakmuran dalam wilayah kerajaan (*akkarungeng*). Menurut Andi Zainal Abidin, karena memiliki wewenang memperingatkan raja dan para pembantunya, para negarawan dan ahli filsafat di zaman kerajaan historis Sulawesi Selatan adalah faktor penting yang turut membatasi kekuasaan raja.¹⁰ Sekalipun Abidin tidak secara eksplisit menyebut mereka *topanrita*, tapi peran mereka sepenuhnya identik dengan konotasi *topanrita* yang dikemukakan di atas. Begitu vitalnya peran seorang yang berpengetahuan dalam sebuah wanua, Karaèng Pattingaloang, salah seorang ilmuwan dan cendekiawan ulung kerajaan Gowa Tallo abad ke-17, memperingatkan bahwa salah satu di antara lima faktor keruntuhan suatu negeri (*lima pammanjènganna matèna*

¹⁰ Andi Zainal Abidin, *Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar* (Bandung: Alumni, 1983), 7

butta lompowa) adalah jika tiada lagi cendekiawan di dalam negeri (*punna tènamo tomangissèngan ri lalang pa'rasanganga*).¹¹

Peran penting seorang cendekiawan atau *topanrita* dalam dinamika sosial-politik di Sulsel era kerajaan historis dapat dilihat, misalnya, dalam rekaman Lontara berikut. Sebelum dilantik menjadi datu Soppeng ke-9, Lamannussak To Akkarangeng (abad ke-15), mendatangi sejumlah *topanrita* di Sulawesi Selatan, termasuk To Ciung Maccae (XV-XVI) di Luwu. Dari To Ciung, La Mannussak mempelajari ilmu kepemimpinan. Salah satu paseng To Ciung kepada Lamannussak, misalnya, “Waspadalah terhadap lawan-lawanmu satu kali, waspadalah terhadap kawan-kawanmu seribu kali. Sebab yang terakhir inilah yang bisa membuatmu rusak.”¹² To Ciung juga menganjurkan Lamannussak sekali-sekali berkonsultasi dengan cendekiawan --yang enggan berkunjung ke istana seperti halnya para oportunis—tentang masalah-masalah yang perlu diselesaikan dengan matang karena mereka justru mengatakan banyak kebenaran (*Obbi'i to accaè tassisèng-sisèng mutanaiwi, nasaba' maègatu patuju napau*).

Petuah-petuah atau paseng dari sejumlah *topanrita* yang kerap muncul dalam wacana orang-orang tua Bugis-Makassar belakangan menjadi dasar bagi sebagian besar ajaran etika tradisional karena kandungan mereka yang universal dan perenial, seperti terekam dalam berbagai Lontara. Di antara *topanrita* yang termaksud adalah: To Ciung Maccae di Luwu (Abad XV), Nènè Maggading di Suppa' (abad XV), La Tiringeng To Taba' dan La Tadampare Puang Ri Maggalatung, keduanya dari Wajo (Abad XV), La Waniaga Arung Bila di Soppeng (Abad XVI), Nene Pasiru' (Abad XV) dan La Pagala Nènè Mallomo (Abad XVI) di Sidenreng, La Mèllong Kajao Laliddong di Bone (abad XVI), Karaeng Botolèmpangan di Gowa (abad XVII), dan I Mangadacinna Daèng Sitaba Karaèng Pattingalloang di Gowa-Tallo (abad XVII). Sosok La Tiringeng To Taba dari Wajo, yang telah disebut di atas, mungkin bisa diulas lebih jauh di sini sekedar sebagai contoh.

¹¹ *Ibid*

¹² “Jagaiwi balimmu wèkka siseng, mujagaiwi rangeng-rangengmu wèkka sisebbu, nasabak rangeng-rangeng mutu matuk solangiko”. Abidin, *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan* (Makassar: Hasanuddin University Press, 1999), h. 105.

C. La Tiringeng To Taba: Sosok Cendekiawan cum Birokrat

Menurut Andi Pabarangi, peran La Tiringeng tak dapat dipisahkan dari perjanjian awal antara rakyat dan raja Wajo di La Paddeppa' yang berhasil merumuskan prinsip-prinsip utama ketatanegaraan (konstitusi) kerajaan Wajo di abad ke-15. Abdurrazak Daeng Patunru dalam *Sejarah Wajo* (1964) menyatakan bahwa, lepas dari peran penting lima Arung Matowa Wajo yang paling terkemuka sepanjang sejarah Wajo (La Tadampare', La Mungkacè', La Tenrilai, La Salèwangeng dan La Maddukelleng), La Tiringeng adalah tokoh terpenting dalam pembentukan sistem politik kerajaan Wajo, khususnya sejak akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16.¹³ La Tiringeng, yang juga bergelar Arung Saotanrè dan Arung Bèttempola ini, hidup sezaman dengan empat Arung Matowa Wajo yang pertama (dari tahun 1474 sampai dengan 1521). Bèttempola adalah negeri bagian (*wamua*) kerajaan Wajo selain Talotenreng dan Tua.

Selama hidupnya, La Tiringeng kerap kali mengambil alih peranan Arung Matowa merumuskan berbagai undang-undang dan keputusan penting tentang berbagai masalah sosial-politik Wajo dari paruh kedua abad ke-15 dan awal abad ke-16, masa-masa ketika kerajaan ini dipandang mencapai puncak kejayaannya.¹⁴ Karena kecerdasan dan kebijaksanaannya juga, La Tiringeng menjadi tempat orang-orang Wajo bertanya dan meminta nasehat atas beragam persoalan. Namun, lepas dari peran penting dia dalam kerajaan Wajo, ada satu hal yang membuat orang-orang Wajo memandangnya sebagai sosok pemimpin yang konsisten memegang janji dan tidak memiliki ambisi pribadi kecuali bertujuan untuk memajukan rakyat dan kerajaan. Yang dimaksud adalah bahwa dia selalu menolak permintaan (bahkan paksaan) rakyat Wajo agar dia menjadi Arung Matoa setiap kali terjadi kekosongan pemerintahan karena meninggalnya Arung Matoa yang sedang memerintah.¹⁵ Alasan dia,

¹³ Abdurrazak Daeng Patunru, *Sedjarah Wajo* (Makassar: YKSST, 1965), h. 111

¹⁴ A. Z. Abidin, *Wajo' pada Abad XV-XVI: Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan* (Bandung: Alumni, 1985), 24

¹⁵ Perlu dicatat, jabatan Arung Matoa Wajo tidak diwariskan secara turun-temurun tapi dipilih oleh sebuah lembaga politik tertinggi dalam kerajaan yang anggotanya terdiri atas 40 bangsawan tinggi Wajo, karena itu disebut Arung Patappuloe (40 bangsawan). Lembaga ini menyerupai DPR dalam sistem demokrasi

hal itu bertentangan dengan perjanjian awalnya dengan rakyat Wajo. Menurut A. Z. Abidin, La Tiringeng dipandang sebagai pemimpin rakyat bukan saja karena ascribed status dan “kesakralannya,” tetapi juga terutama karena kualitas pribadinya serta jasanya dalam menyusun dan melaksanakan sistem kekuasaan yang terbatas kepada raja dan para aparatnya.¹⁶ Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Patunru memandang La Tiringeng sebagai “ahli filsafat” Wajo.¹⁷

Sebagaimana To Ciung Maccaè, Nènè Mallomo, Arung Bila, Kajao Laliddong dan Karaèng Pattingalloang, La Tiringeng mewujudkan diri sebagai sosok *topanrita* Bugis *par excellence*. Dalam berbagai Lontara Wajo, dia digambarkan sebagai seorang cendekiawan dan negarawan yang tidak saja bijaksana, cerdas dan mencintai rakyatnya, tetapi juga seorang ahli dan penegak hukum yang tegas, jujur dan tidak terbius oleh kekuasaan dan kekayaan. Tidak aneh jika petuah-petuahnya lebih dari enam abad silam, menurut banyak pengamat budaya, masih relevan untuk ditelaah sebagai sumber inspirasi, landasan etika dan pedoman dalam menata kehidupan sosial, hukum, politik dan pemerintahan kontemporer, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Salah satu pesan La Tiringeng yang kerap kali dirujuk untuk menunjukkan aktualitas pesan itu dengan kondisi kontemporer adalah, “*Napoallebirengngi to Wajoè, maradèkaè, na malempu, na mapaccing ri gau’ salaè, marèsò mappalaong, na maparekki ri warang-paranna*”¹⁸ (Orang Wajo mulia karena mereka memiliki kebebasan, kejujuran, kesucian dari perilaku buruk, kerajinan bekerja, dan memelihara harta benda). Secara sepintas, inti pesan di atas tampaknya memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip utama dalam manajemen modern untuk menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera.

La Tadampare Puang Ri Maggalatung, Arung Matowa Wajo ke-4 (memerintah 1491-1521) dan hidup semasa dengan La Tiringeng To Taba, mungkin juga merupakan sosok *topanrita* yang lebih unik lagi. Sebagaimana digambarkan di banyak Lontara, sebagai Arung Matoa

modern. Tentang penerapan sebagian besar prinsip-prinsip demokrasi modern dalam kerajaan elektif Wajo abad ke-15 dan 16, lihat Abidin, *Persepsi Orang Bugis*; Patunru, *Sedjarah Wajo*; Mattulada, “Manusia dan Kebudayaan Bugis-Makassar,” dan Pelras, *Manusia Bugis*.

¹⁶ Abidin, *Op.Cit*

¹⁷ Patunru, *Op.Cit*, h. 21.

¹⁸ *Ibid*

Wajo ke-4, dia menampilkan diri sebagai pemimpin dan cendekiawan yang cerdas, adil, tegas dan bijaksana sehingga di masa pemerintahan dialah, Kerajaan Wajo dipandang mencapai puncak kegemilangannya.¹⁹ Tampaknya, salah satu faktor penting yang membawa Wajo mencapai *the golden age*-nya tersebut adalah karena selama periode itu tercipta semacam sinergi dan harmoni antara penguasa (Puang Ri Maggalatung) dan cendekiawan atau *topanrita* (salah satunya, La Tiringeng To Taba).

Puang Ri Maggalatung sendiri sesungguhnya juga merepresetasikan diri sebagai sosok *topanrita*. Beberapa petuah-petuanya masih sering dikutip dan diselipkan dalam pembicaraan-pembicaraan orang-orang tua Bugis pada masa kini. Salah satu ungkapan yang terkenal dan belakangan bahkan juga menjadi motto kabupaten Wajo adalah *maradeka to Wajo'E ade'nami napopuang* (Orang Wajo merdeka, hanya konstitusi yang dipertuan). Bentuk lengkap ungkapan tersebut, yang juga menjadi *ade' ammara-dèkangenna to Wajo'e* (prinsip dasar hak-hak kemerdekaan orang-orang Wajo) adalah “*Maradèka to Wajo'è, najajiang alèna maradèka, tanaèmi ata, naia to makkètanaè maradèka maneng, ade' assamaturusennami napopuang.*” (Orang Wajo itu merdeka dan dilahirkan merdeka. Hanya tanah yang menjadi budak sementara manusia yang hidup di atasnya adalah merdeka. Hanya adat permufakatan [konsensus] mereka yang mereka patuhi). Dengan prinsip ini, orang-orang Wajo sejatinya hanya terikat oleh perintah seorang raja (Arung Matoa) selama perintah itu bersesuaian dengan *ade' assamaturusenna to Wajo'è* (konsensus orang-orang Wajo). Sebagaimana ditulis oleh Jacobus Noorduyn, sarjana Belanda abad ke-20 yang menulis disertasi tentang asal-mula Kerajaan Wajo, “*The man chosen as arung matoa is, it is true, 'the highest ruler', but only on the grounds of what his country, his people and their representatives signify. His fundamental dependence on those who have chosen him is here laid down.*”²⁰ Malahan, dalam satu ungkapan lain, yang juga

¹⁹ Lihat, *Ibid*

²⁰ (Memang benar, orang yang terpilih sebagai Arung Matoa adalah ‘penguasa tertinggi’, tetapi hanya dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh negerinya, rakyatnya dan para wakilnya. Di sinilah terletak ketergantungan mendasar [penguasa tersebut] pada mereka yang telah memilihnya). J. Noorduyn, “The Wajorese merchants’ community in Makassar” dalam Roger Tol, Kees van

diasosiasikan dengan Puang Ri Maggalatung, disebutkan bahwa “*Ri laleng tampu’ mupi namaradèka to Wajo’è*” (Bahkan semenjak masih dalam kandungan mereka, orang-orang Wajo sudah merdeka).

Oleh karena itu, memang agak tragis jika dicermati bahwa dalam masyarakat Wajo kontemporer, juga di beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan, prinsip persamaan hak di depan hukum, keadilan dan kemerdekaan berusaha dan berpendapat orang-orang yang tinggal di Wajo cenderung semakin diabaikan. Padahal prinsip-prinsip itulah juga yang beberapa abad kemudian dirumuskan sebagai konsep demokrasi di Barat. Gaya kepemimpinan feodalistik yang memperlakukan bawahan sebagai *ata* (budak) yang harus selalu patuh kepada perintah atasan mereka sekalipun perintah itu bertentangan dengan undang-undang dan konsensus, tampaknya mulai ditampilkan lagi. Banyak yang telah melupakan karakter kepemimpinan Puang Ri Maggalatung yang, karena memandang semua manusia pada hakikatnya dilahirkan bebas dan sama harkat dan martabatnya di mata Tuhan, memilih menyeru atau menyapa rakyatnya dengan panggilan “*ana’ eppoku*”, yang berarti anak-cucu, daripada menyebut mereka “*ataku*” (budakku).

D. Makna Topanrita Pasca-Islamisasi Sulawesi Selatan abad ke-17

Setelah hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan terislamisasi secara struktural pada dekade awal abad ke-17,²¹ konsep *topanrita* tampaknya juga mengalami perluasan makna. Seperti ditulis Pelras, sekalipun istilah *topanrita* berasal dari bahasa Sanskerta, setelah Islam diterima di Sulawesi Selatan makna *topanrita* mulai diidentikan dengan kata ‘Arab *‘alim* (jamak: *‘ulama*).²² Dalam konteks masyarakat Sulawesi Selatan kontemporer, *topanrita* tidak saja bermakna tokoh yang saleh dan berilmu pengetahuan keislaman yang luas, tapi juga menjadi semacam tokoh teladan (*role model*) dalam

Dijk dan Greg Acciaioli (eds.), *Authority and Enterprise among the Peoples of South Sulawesi* (Leiden: KITLV Press, 2000), h. 114.

²¹ Ulasan yang lebih dalam tentang Islamisasi Sulsel bisa diperoleh dalam artikel klasik J. Noorduyn (“De Islamisering van Makassar”) yang telah diterjemahkan menjadi *Islamisasi Makassar* (Jakarta: Bharata, 1972) dan, karya yang lebih belakangan, Christian Pelras, “Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi” dalam *Archipel* vol. 57 (1993).

²² Pelras, *Op. Cit.*, h. 259.

masyarakat. *Topanrita* juga menjadi kualitas moral yang diidamkan oleh setiap orang tua untuk anak-anak mereka ketika mereka beranjak dewasa. Oleh karena itu, ungkapan “*tau llao sala mancaji topanrita*” (orang bejat berubah menjadi orang alim) merujuk kepada seseorang yang telah mengalami semacam pertobatan diri atau transformasi karakter buruk menjadi orang baik yang. Biasanya, proses peralihan ini disimbolkan dengan keputusan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah (sekaligus memperdalam pengetahuan agama).²³

Di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20, muncul sejumlah lembaga pendidikan Islam tradisional (pesantren), seperti Pengajian kitab di Pulau Salemo, Pangkep (sekitar 1910-1942), Madrasah As’adiyah di Sengkang, Wajo (sejak 1930), dan Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad (DDI) di Mangkoso, Barru (sejak 1938). Lembaga-lembaga pendidikan ini berhasil melahirkan figur ulama dengan pengetahuan agama Islam yang luas dan karakter pribadi yang rendah hati, ikhlas dan memelihara integritas moral. Beberapa ulama produk lembaga pendidikan tersebut di atas mengabdikan diri di almamater mereka, baik sebagai pimpinan maupun sebagai pengajar kitab-kitab klasik di bidang pengetahuan agama Islam, sambil menjalankan aktivitas dakwah agama dan tugas-tugas kemasyarakatan secara lebih luas.

Sejak itu, *topanrita* dan *apanritangen* (kecendekiaan) lebih diidentikkan dengan sosok dan karakter ulama yang memiliki karisma, kepemimpinan, dan keahlian dalam ilmu pengetahuan agama Islam secara luas dan dalam. Secara kebetulan, tipe ulama seperti ini pada umumnya merupakan produk lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti yang telah disebutkan di atas. Pada kenyataannya, dalam masyarakat Bugis abad ke-20, sapaan (*terms of address*) tertinggi untuk sosok ulama karismatik dan berpengetahuan luas tersebut adalah *anregurutta* (bapak/ibu guru kita).²⁴ Sementara ulama yang

²³ *Ibid.*, h. 260.

²⁴ Dalam masyarakat Muslim Makassar, istilah yang identik dengan *anre guru* dalam masyarakat Bugis adalah *anrong guru*. Namun demikian, perlu dicatat bahwa jika di masa modern *anrong guru* merupakan gelar keulamaan (*term of address*) dalam masyarakat Muslim Makassar, di masa sebelumnya ia juga merujuk kepada jabatan birokratik tertentu (kepala desa, kepala kampung, kepala pengawal istana, dsb) dalam struktur kekuasaan kerajaan Gowa. Lihat, Mustari Bosra, *Tuang Guru, Anrong Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942* (Makassar: La Galigo Press, 2008), h. 90

berada di bawah tingkatan itu disebut *gurutta* (guru kita) dan pada tingkatan yang lebih rendah lagi disebut *ustadz* (juga bermakna guru, dalam bahasa Arab). Ketika seorang ulama sudah mencapai tingkat pengetahuan agama dan kepribadian tertinggi, maka masyarakat Bugis menyebutnya *topanrita*.²⁵

Dengan demikian, terlihat di sini, kedatangan Islam yang memunculkan sosok ulama karismatik dengan pengetahuan agama yang luas, berhasil mentransformasi makna dan peran *topanrita* secara tradisional. Berbeda dengan pandangan Ahmad yang membatasi kompetensi keahlian ulama Bugis pada ilmu pengetahuan agama Islam saja,²⁶ penulis justru melihat sosok ulama, yang muncul seiring dengan dijadikannya Islam sebagai agama kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar, menguasai atau dipandang menguasai tidak saja ilmu-ilmu keislaman tetapi juga kerap kali menampilkan diri sebagai sosok yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial-budaya, hukum, ekonomi dan politik yang muncul dalam masyarakatnya.

Pada kenyataannya, *anre gurutta* (guru utama) atau *gurutta* (guru) bukan hanya mengajarkan orang-orang tentang berbagai masalah agama dalam suatu lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren, tetapi juga menjadi rujukan bagi orang-orang yang membutuhkan nasehat dan doa-doa mustajab untuk kelancaran berbagai urusan duniawi. Orang-orang seperti ini mendatangi *anregurutta*, misalnya, ketika mereka sangat berharap memperoleh kesuksesan dalam berbisnis, keberlimpahan hasil panen, kesembuhan dari penyakit jasmani dan rohani, penyelesaian untuk masalah hukum atau keselamatan di medan pertempuran (ilmu kebal/kesaktian). *Topanrita* dalam makna tradisionalnya juga menjalankan peran-peran yang sama dalam masyarakat Bugis di masa lalu, minus peran sebagai guru di lembaga-lembaga formal pengajaran ilmu agama.

²⁵ Lihat Abd. Kadir Ahmad, *Ulama Bugis* (Makassar: Indobis Publishing, 2008), h. 415. Menurut Ahmad lebih lanjut, kompetensi yang melahirkan sosok seorang ulama Bugis mencakup kompetensi keilmuan (pengetahuan ilmu agama), kompetensi sosial (aspek pengamalan agama), dan kompetensi akhlak (kepribadian). Sementara tiga sifat utama ulama Bugis menurut Ahmad adalah rendah hati dalam keilmuan, ikhlas dalam beramal, dan berhati-hati menjaga kesucian akhlak. Lihat Ahmad, *Ulama Bugis*, h. 417.

²⁶ *Ibid.*, h. 416.

Di samping itu, dan lebih penting lagi, seperti peran *topanrita* di masa lalu, para ulama juga berperan sebagai penasihat atau konsultan para penguasa (*sultan*) dalam menyelesaikan berbagai masalah yang sedang mengemuka dalam wilayah kekuasaan mereka. Dalam terminologi modern, *topanrita* sesungguhnya merepresentasikan diri sebagai salah satu komponen penting *civil society* di masa lalu. Sebab, dengan kapasitas, otoritas dan pengaruh keilmuan dan keagamaan mereka, mereka bisa berperan penting dalam membatasi secara tidak langsung wewenang dan kekuasaan penguasa. Berdasarkan penelitiannya terhadap masyarakat Ara di Bulukumba, Thomas Gibson dan terhadap sejarah kedatangan Islam di Sulawesi Selatan, menyimpulkan adanya enam model tokoh Islam yang menjadi panutan dalam masyarakat Muslim Sulawesi Selatan: penguasa sebagai Pribadi Sempurna (*Insan Kamil*); orang-orang suci militan; Rasul sebagai perantara universal; tokoh-tokoh jihad yang mengutamakan akhirat; Haji yang taat; dan Nasionalis religious.²⁷ Tokoh Islam model kedua yang dimaksud Gibson adalah orang-orang, kerap kali lahir dari keluarga biasa, yang setelah menunaikan ibadah Haji di Mekah lalu tinggal beberapa tahun di sana untuk memperdalam pengetahuan agama Islam dan kemudian menjadi orang-orang suci yang kosmopolitan. Mereka mengejar pengetahuan dan kekuasaan bukan dengan mendaki hierarki lapisan sosial yang melulu berdasarkan *ascribed status* (genealogi *tomanurung*), namun melalui perjuangan atau petualangan keilmuan dalam mengejar pengetahuan universal.²⁸ Dalam konteks masyarakat Bugis Wajo, mobilitas vertikal sosok ulama seperti ini sepenuhnya sesuai dengan salah satu dari empat pencapaian status sosial berdasarkan prestasi (*achievement oriented status*), yaitu menjadi *topanrita*. Tiga lainnya, seperti telah dijelaskan di muka, adalah menjadi *tosugi* (orang kaya), *towarani* (kesatria), dan *toacca* (orang pintar). Dalam konteks modern, keempat kualitas di atas dapat tergambar masing-masing dalam sosok: ulama, saudagar, tentara, dan sarjana.

²⁷ Lihat Thomas Gibson, *The Sun Pursued the Moon: Symbolic Knowledge and Traditional Authority among the Makassar*, diterjemahkan dengan judul *Kekuasaan Raja, Syekh, dan Ambtenaar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000* oleh Nurhady Sirimorok (Makassar: Nininnawa, 2005), h. 304.

²⁸ Gibson, *Op.Cit*, h. 302.

Menurut Pelras prototipe *topanrita* pra-Islam adalah We Tenriabeng, saudara kembar Sawerigading, seperti dikisahkan dalam epik kolosal La Galigo.²⁹ Agak aneh memang bahwa pada periode pra-sejarah Sulawesi Selatan, *topanrita* lebih banyak direpresentasikan oleh sosok perempuan. Sementara, di era kerajaan historis dan modern Sulawesi Selatan, sosok *topanrita* direpresentasikan oleh laki-laki. Oleh karena itu, mungkin cukup beralasan untuk menyebut Syekh Yusuf Al-Makassari (1626-1699)³⁰ sebagai sosok *topanrita par excellence* Sulawesi Selatan pasca-Islamisasi. Sementara Anregurutta Haji (AGH) Muhammad As'ad al-Bugis di Wajo (1907-1952),³¹ yang dipandang sebagai *hadrat al-syaikh* atau mahaguru para ulama Sulawesi Selatan abad ke-20, dan AGH. Abdurrahman Ambo Dalle (1900-1996)³², murid As'ad yang dipandang sebagai ulama paling

²⁹ Untuk informasi ringkas namun bermanfaat tentang epik La Galigo dalam masyarakat Bugis, lihat Sirtjo Koolhof, "The 'La Galigo'; A Bugis Encyclopedia and Its Growth," dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkerkunde, vol. 155 no. 3 (1999), h. 326-387.

³⁰ Kini terdapat banyak karya bermutu tentang Syekh Yusuf. Lihat antara lain: Tudjimah, *Syekh Yusuf Makassar: Riwayat dan Ajarannya* (Jakarta: UI-Press, 1997); juga Abu Hamid, *Syekh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang* (Jakarta: YOI, 1994), h. 43

³¹ Untuk biografi singkat AGH. Muhammad As'ad, lihat Daud Ismail, *Riwayat Hidup Almarhum K.H.M. As'ad Pendiri Utama As'adiyah Sengkang-Wajo* (dalam tiga bahasa, Indonesia-Bugis-Arab, Ujung Pandang: Bintang Selatan, t.th.). Lihat juga karya rintisan Muhammad Hatta Walinga, "Kiyai Haji Muhammad As'ad: Hidup dan Perjuangannya" (Skripsi sarjana Fak. Adab IAIN Alauddin Makassar, 1980); Abd. Azis Al-Bone, *Peranan Kyai di Sulawesi Selatan (Studi Kasus KHM As'ad di Sengkang Wajo)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian, Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (UnitE-P3M) Pesantren Ciganjur, 1987; Martin van Bruinessen, "Muhammad As'ad Bugis (Wajo, South Sulawesi, Indonesia, 1907-1953)." in *Dictionnaire Biographique des Savants et Grande Figures du Monde Musulman Périphérique, du XIXe siècle à nos jours*, Fasc. no 2. (Paris: CNRS-EHESS, 1998); dan Zainuddin Hamka, *Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. Muh. As'ad al-Bugisi* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan Depag, 2009).

³² Untuk biografi AGH. Abdurrahman Ambo Dalle, lihat H. T. Syamsuddin, *Biografi Ulama KH Abd. Rahman Ambo Dalle* (Mangroso: DDI, 1986); Juga Taufiq Adnan Amal, "Gurutta K. H. Abdul Rahman Ambo Dalle (1900-1996): Ulama Besar dari Tanah Bugis" dalam Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedowi (eds), *Transformasi Otoritas Keagamaan: Pengalaman Islam Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003); HM Nasruddin Anshoriy Ch, *Anregurutta Ambodalle: Mahaguru dari Bumi Bugis* (Yogyakarta: Jendela (bekerja sama dengan) Pesantren Budaya Ilmu Giri, 2006; dan biografi yang lebih lengkap oleh Muhammad Yusuf Khalid, *Biografi Kiyai Hj. Abd. Rahmad Ambo Dalle dan Sumbangannya dalam Dakwah di Sulawesi Selatan Indonesia* (Kuala Lumpur: Unit Penerbitan Kolej Universiti Islam Malaysia, 2005).

berpengaruh di Sulawesi Selatan pada abad ke-20 dan 21 – untuk sekedar menyebut dua contoh yang paling terkenal-- adalah sosok *topanrita* terbaik Sulawesi Selatan di era modern.

E. Kesimpulan

Jadi, seperti ditunjukkan dalam paragraf-paragraf di atas, peran *topanrita* di bidang sosial, hukum, budaya, agama dan kekuasaan politik dalam masyarakat Sulawesi Selatan terlihat sangat sentral. Hubungan harmonis dan saling menghargai antara *arung* dan *topanrita*, atau dalam terminologi keilmuan Islam, antara '*umara*' (Arab, tunggal: '*amir*', penguasa) dan '*ulama*', adalah salah satu faktor penting yang membawa beberapa kerajaan tradisional Sulawesi Selatan mencapai puncak kegemilangan dalam fase-fase tertentu sejarah mereka. Dengan kata lain, meminjam ungkapan yang terkenal dalam Lontara, prinsip *sipakalebba* (saling menghormati), *sipakatau* (saling menghargai), dan *sipakainge*' (saling mengingatkan) antara *arung* dan *topanrita* benar-benar terpelihara. Sementara itu, penetrasi Islam di Sulawesi Selatan, seperti diamati oleh Pelras, 'menyumbangkan warna baru terhadap prototipe [manusia Bugis: WH] yang ada dengan memperkuat aspek-aspek etika.'³³

Dalam konteks sosial-politik Sulawesi Selatan kontemporer, hubungan harmonis dan simbiotik antara kedua kelompok elit dalam masyarakat ini (*arung*/'*umara*' dan *topanrita*/'*ulama*') cenderung semakin jarang dijumpai? Sudah sangat jarang terlihat, pejabat tinggi atau calon pejabat dalam birokrasi pemerintahan dalam berbagai tingkatan yang masih mau mendatangi cendekiawan/ulama dan meminta nasehat dan kritik dari mereka seperti yang dilakukan Lamannussak di atas. Di pihak lain, sudah semakin jarang juga terdengar ada ulama dengan kualifikasi *topanrita* --dalam pengertian tradisional dan modernnya-- dalam masyarakat Sulawesi Selatan saat ini, yang menunjukkan keberpihakan dan kepedulian terhadap masalah-masalah keumatan serta memelihara kejujuran dan ketulusan, kemudian dengan tegas menasehati, mengkritik dan mengoreksi penguasa yang korup dan mementingkan diri sendiri. Yang lebih sering mencuat ke ranah publik adalah kecenderungan kedua elit sosial tersebut untuk bersaing bahkan berseteru dalam mendapatkan atau melanggengkan pengaruh sosial, kegamaan, kultural dan politik

³³ Pelras, *Op.Cit.*, h. 260.

mereka di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, bukannya menampilkan prinsip *sipakalebbi*, *sipakatau* dan *sipakainge'*, ulama dan pemerintah justru cenderung mempertontonkan budaya *sipaka-siri'-siri'* (saling mempermalukan), *sipakatau-tau* (saling mengancam dan menakut-nakuti) dan *sipakalinge'-linge'* (sama-sama gila) di hadapan masyarakat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazak Daeng Patunru, 1965. *Sedjarah Wajo*, Makassar: YKSST.
- Amal, Taufiq Adnan, 2003. "Gurutta K. H. Abdul Rahman Ambo Dalle (1900-1996): Ulama Besar dari Tanah Bugis" dalam Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedowi (eds), *Transformasi Otoritas Keagamaan: Pengalaman Islam Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Zaenal Abidin, 1985. *Wajo' pada Abad XV-XVI: Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan*, Bandung: Alumni.
- Andi Zaenal Abidin, 1999. *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*, Makassar: Hasanuddin University Press.
- Andi Zainal Abidin, 1983. *Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*, Bandung: Alumni.
- Anshory, Nasruddin Anshoriy, 2006. *Anregurutta Ambodalle: Mahaguru dari Bumi Bugis*, Yogyakarta: Jendela & Pesantren Budaya Ilmu Giri.
- Gibson, Thomas, 2007. *Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia: From the 16th to the 21st Century*, New York: Palgrave Macmillan.
- Gibson, Thomas. 2005. *The Sun Pursued the Moon: Symbolic Knowledge and Traditional Authority among the Makassar*, diterjemahkan dengan judul *Kekuasaan Raja, Syeikh, dan Ambtenaar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000* oleh Nurhady Sirimorok Makassar: Nininnawa, 2005.
- Koolhof, Sirtjo 1999. "The 'La Galigo'; A Bugis Encyclopedia and Its Growth," dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkerkunde*, vol. 155 no. 3.
- M. Ide Said DM., 1977. *Kamus Bahasa Bugis-Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Matthes, B.F. 1874. *Boegineesch-Hollandsch Woordenboek*, Amsterdam: 'S Gravenhage.

- Mattulada, 1991. "Elite di Sulawesi Selatan" dalam *Antropologi*, no. 48.
- Mattulada, 1998. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Makassar: Hasanuddin University Press).
- Muhammad Yusuf Khalid, *Biografi Kiyai Hj. Abd. Rahmad Ambo Dalle dan Sumbangannya dalam Dakwah di Sulawesi Selatan Indonesia* Kuala Lumpur: Unit Penerbitan Kolej Universiti Islam Malaysia, 2005.
- Noorduyn, J, 2000. "The Wajorese merchants' community in Makassar" dalam Roger Tol, Kees van Dijk dan Greg Acciaoli (eds.), *Authority and Enterprise among the Peoples of South Sulawesi*, Leiden: KITLV Press.
- Pelras, Christian, 2006. *The Bugis*, diterjemahkan dengan judul *Manusia Bugis* oleh Abdul Rahman Abu, Hasriadi dan Nurhady Sirimorok (Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta Paris, EFEO).
- Smith, Anthony D., 1981 *The Ethnic Revival*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Syamsuddin, HT., 1986. *Biografi Ulama KH Abd. Rahman Ambo Dalle*, Mangkoso: DDI.